



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Implementasi SDG's Melalui Pembangunan Daerah

Disampaikan Pada 28 Juli 2022
Smart Discussion Series 21 Tahun 2022

FAHMI PRAYOGA



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Fahmi Prayoga

Riwayat Pendidikan

- **Sarjana Ekonomi**
- Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Pengalaman Pendampingan Pemerintah

1. (2022) Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian ATR/BPN 2020-2024
2. (2022) Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kab. Deli Serdang TA 2021
3. (2021) Asisten Asesor Eksternal SPBE 2021 Kementerian PAN-RB
4. (2021) Kajian Profil Investasi Daerah Kabupaten Lamandau
5. (2020) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Perubahan Kabupaten Lamandau 2018-2023
6. (2020) Kajian Bagian Anggaran Mandiri BPH Migas
7. Dll.



SPV Klaster Kebijakan Pembangunan
Ekonomi,
Peneliti SmartID



**SMART
DISCUSSION
SERIES 2022**

APA YANG KITA INGINKAN

UNTUK MASA DEPAN?

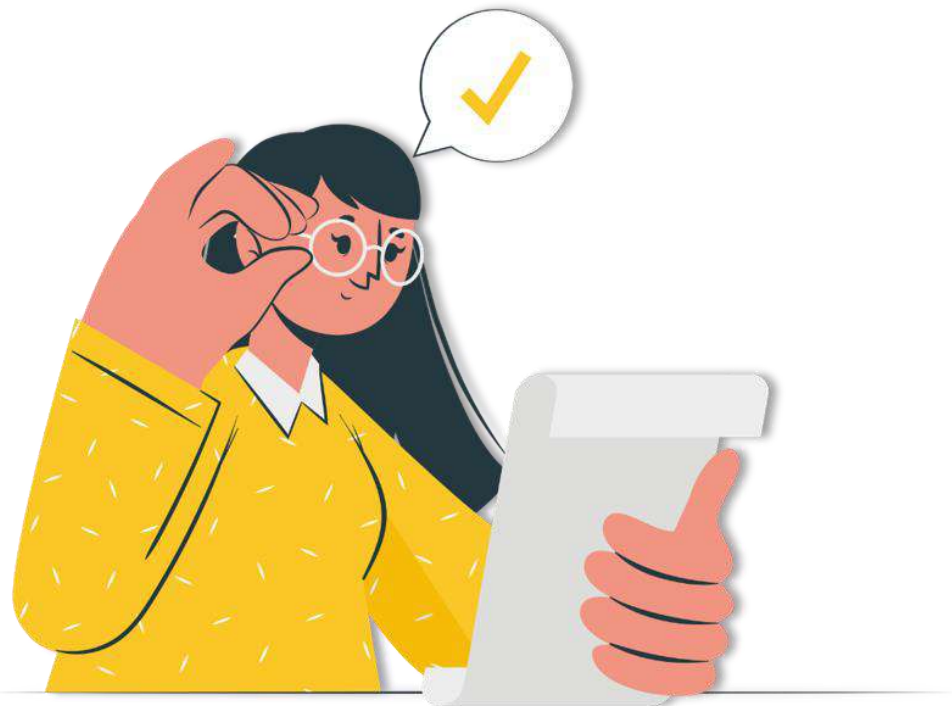




SmartID



SMART DISCUSSION SERIES 2022



KELUARGA YANG SEHAT

PENDIDIKAN YANG MERATA

AKSES UNTUK AIR BERSIH

EKONOMI YANG KUAT

LINGKUNGAN YANG TERAWAT

“ ..Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.. ”

-Pembukaan UUD 1945-



SMART DISCUSSION SERIES 2022

DASAR HUKUM

1

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Constitution

LAW





SMART DISCUSSION

SERIES 2022

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S

Apa Itu SDGs ?

**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**





4 PILAR SDGs

SOSIAL

Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

LINGKUNGAN

Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan

EKONOMI

Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan

HUKUM & TATA KELOLA

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum



SmartID



SMART DISCUSSION SERIES 2022

1 TANPA KEMISKINAN

2 TANPA KELAPARAN

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

5 KESETARAAN GENDER

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

14 EKOSISTEM LAUTAN

15 EKOSISTEM DARATAN

16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN





SMART DISCUSSION SERIES 2022

METADATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S INDONESIA



SMART DISCUSSION SERIES 2022



TPB/SDGs Nasional
17 Tujuan, 289 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL 87 Indikator



Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan
(14 Indikator)



Tujuan 2: Tanpa Kelaparan
(16 Indikator)



Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
(31 Indikator)



Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas
(14 Indikator)



Tujuan 5: Kesetaraan Gender
(12 Indikator)

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI 89 Indikator



Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau
(7 Indikator)



Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
(19 Indikator)



Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
(21 Indikator)



Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan
(17 Indikator)



Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
(25 Indikator)

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 77 Indikator



Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
(10 Indikator)



Tujuan 11: Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
(17 Indikator)



Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab
(17 Indikator)



Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim
(9 Indikator)



Tujuan 14: Ekosistem Lautan
(10 Indikator)



Tujuan 15: Ekosistem Daratan
(14 Indikator)

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA 36 Indikator



Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh
(36 Indikator)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Perkembangan Metadata Indikator Nasional TPB/SDGs

METADATA EDISI I

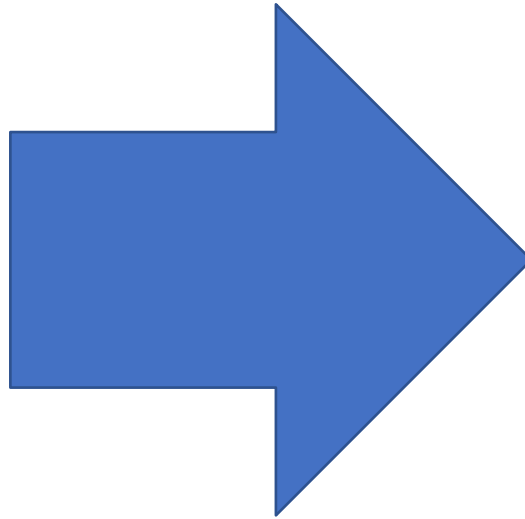


- ✓ Diterbitkan pada **tahun 2017** sebagai Metadata Indikator Nasional TPB/SDGs di Indonesia.
- ✓ Terdapat **319** Indikator Nasional
- ✓ Menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2017 – 2019
- ✓ Terdapat 94 Target yang *mainstream* dengan RPJMN 2015-2019

METADATA EDISI II



- ✓ Diterbitkan pada **tahun 2020** sebagai Metadata Indikator Nasional TPB/SDGs Edisi II menggantikan Edisi I.
- ✓ Terdapat **289** Indikator Nasional
- ✓ Menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021 – 2024
- ✓ Terdapat 124 Target yang *mainstream* dengan RPJMN 2020 -2024



METADATA EDISI I

		Tujuan 1 → 26 Indikator
		Tujuan 2 → 14 Indikator
		Tujuan 3 → 26 Indikator
		Tujuan 4 → 11 Indikator
		Tujuan 5 → 14 Indikator
		Tujuan 7 → 6 Indikator
		Tujuan 8 → 17 Indikator
		Tujuan 9 → 12 Indikator
		Tujuan 10 → 11 Indikator
		Tujuan 17 → 25 Indikator
		Tujuan 6 → 29 Indikator
		Tujuan 11 → 21 Indikator
		Tujuan 12 → 7 Indikator
		Tujuan 13 → 4 Indikator
		Tujuan 14 → 9 Indikator
		Tujuan 15 → 13 Indikator
		Tujuan 16 → 34 Indikator

BERUBAH
MENJADI

METADATA EDISI II

		Tujuan 1 → 14 Indikator
		Tujuan 2 → 16 Indikator
		Tujuan 3 → 31 Indikator
		Tujuan 4 → 14 Indikator
		Tujuan 5 → 12 Indikator
		Tujuan 7 → 7 Indikator
		Tujuan 8 → 19 Indikator
		Tujuan 9 → 21 Indikator
		Tujuan 10 → 17 Indikator
		Tujuan 17 → 25 Indikator
		Tujuan 6 → 10 Indikator
		Tujuan 11 → 17 Indikator
		Tujuan 12 → 17 Indikator
		Tujuan 13 → 9 Indikator
		Tujuan 14 → 10 Indikator
		Tujuan 15 → 14 Indikator
		Tujuan 16 → 36 Indikator

FAQ: Mengapa Metadata Indikator SDGs mengalami kaji ulang atau pemuktahiran?

JAWABAN:

Kaji ulang Metadata Indikator Nasional SDGs dilakukan untuk:

- Menyesuaikan indikator nasional agar bisa sesuai dengan indikator global.
- Mempertajam definisi dan konsep dari indikator nasional SDGs.
- Menyesuaikan metode perhitungan apabila ada perubahan cara pengumpulan data atau sumbernya.
- Memperbaiki kesalahan minor yang ada pada metadata edisi sebelumnya.
- Menghilangkan indikator proxy apabila sudah ada indikator nasional yang sesuai indikator global dan apabila indikator tersebut dirasa sudah tidak lagi dibutuhkan.

Tidak semua indikator pada metadata indikator nasional SDGs dilakukan perubahan.

Pemetaan Indikator SDGs (Global dan Nasional) dan Klasifikasinya

Indikator tingkat global yang BELUM menjadi indikator nasional Indonesia berjumlah 109 indikator. Indikator ini akan terus dicoba dikembangkan pada Metadata Nasional edisi selanjutnya.

Total Indikator Global (UNSTAT):
247



Indikator Nasional
SESUAI
INDIKATOR
GLOBAL
135

Indikator Nasional sesuai dengan indikator global adalah indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global. Dapat dilihat perbedaannya pada kode indikator yang memiliki tanda bintang (*)

Indikator Global yg MEMILIKI PROKSI dan akan dikembangkan
64

Indikator nasional sebagai PROKSI indikator global
98

Indikator Nasional sebagai Proksi adalah indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global. Dapat dilihat perbedaannya pada kode indikator yang memiliki notasi (a) (b) (c)

Indikator Global yg akan dikembangkan
45
*tidak memiliki proksi nasional

Indikator Nasional sebagai PENGAYAAN
56

Indikator Nasional sebagai pengayaan atau tambahan adalah indikator nasional sebagai pengayaan dari indikator nasional sesuai indikator global untuk menambahkan data capaian yang bisa Indonesia laporkan. Dapat dilihat perbedaannya pada kode indikator yang memiliki notasi [a], [b], [c]

Indikator Global yg tidak relevan
3

Total Indikator NASIONAL sesuai Metadata Ed. II
289





SMART DISCUSSION SERIES 2022

Contoh Perubahan pada Metadata Indikator TPB/SDGs Nasional Edisi II (Contoh 1)

METADATA SDGs EDISI I – BUKU PILAR SOSIAL Indikator 3.3.1.(a) sebagai proksi indikator global

INDIKATOR 3.3.1.(a)

Prevalensi HIV pada populasi dewasa.

KONSEP DAN DEFINISI

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Prevalensi HIV pada populasi dewasa adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun) kemudian dikalikan dengan 100.

Rumus:

$$PHIV = \frac{JOHIV}{JP15-49} \times 100\%$$

METADATA SDGs EDISI II – BUKU PILAR SOSIAL Indikator 3.3.1* sebagai indikator sesuai global

INDIKATOR 3.3.1*

Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.

KONSEP DAN DEFINISI

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi, menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci adalah jumlah kasus baru infeksi HIV per 1000 orang-tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi, menurut jenis kelamin, umur dan populasi kunci.

Rumus:

$$\text{InsidenHIV} = \frac{J\text{InfbaruHIV}}{J\text{PnonInf}} \times 1000$$

Keterangan:

- InsidenHIV : Infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi
- JInfbaruHIV : Jumlah infeksi baru HIV
- JPnonInf : Jumlah penduduk tidak terinfeksi HIV

Indikator 3.3.1.(a) pada Metadata Edisi I **berubah menjadi** Indikator 3.3.1* pada Metadata Edisi II

Konsep dan Metode perhitungannya pun berubah

CONTOH 1: Indikator nasional yang “naik kelas” dari Indikator proksi menjadi indikator sesuai global



Contoh Perubahan pada Metadata Indikator TPB/SDGs Nasional Edisi II (Contoh 2)

Indikator 3.7.1* secara konsep dan definisi masih sama pada Metadata Edisi I dan II Tetapi metode perhitungannya berubah

INDIKATOR 3.7.1*

Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern adalah persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang berstatus kawin (Pasangan Usia Subur/PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi (*limiting*) atau ingin menunda memiliki anak (*spacing*) dan menggunakan metode kontrasepsi modern.

METADATA SDGs EDISI I – BUKU PILAR SOSIAL Indikator 3.7.1*

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$CPR \text{ Modern} = \frac{JPMdMAK}{JPMAC} \times 100\%$$

Keterangan:

- CPR Modern : Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
- JPMdMAK : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern
- JPMAC : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memerlukan alat kontrasepsi

METADATA SDGs EDISI I – BUKU PILAR SOSIAL Indikator 3.7.1*

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern masing-masing dihitung untuk kelompok i yaitu:

- Perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS). Perhitungan WUS digunakan untuk pelaporan SDGs di tingkat global.
- Perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur). Perhitungan PUS digunakan untuk pelaporan kinerja RPJMN di tingkat nasional.

Komponen CPR_i(a)

Jumlah perempuan usia reproduksi 15-49 tahun pada kelompok i yang menggunakan sedikitnya satu jenis metode kontrasepsi dibagi jumlah total perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$CPR_i = \frac{JPeKi}{JPei} \times 100\%$$

Keterangan:

- CPR_i : Angka prevalensi kontrasepsi pada kelompok i
- JPeKi : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan alat kontrasepsi
- JPei : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama

Indikator 3.7.1* pada Metadata Edisi I berubah metode perhitungannya pada Metadata Edisi II

CONTOH 2: Indikator nasional yang metode perhitungannya berubah pada Metadata Edisi II



Contoh Perubahan pada Metadata Indikator TPB/SDGs Nasional Edisi II (Contoh 3)

Indikator 2.2.1.(a)
terdapat pada Metadata Edisi I sebagai indikator pengayaan/tambahan dari indikator 2.2.1*

INDIKATOR 2.2.1.(a)

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.

KONSEP DAN DEFINISI

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.

Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak baduta dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3,0
2. Pendek : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore < -2,0

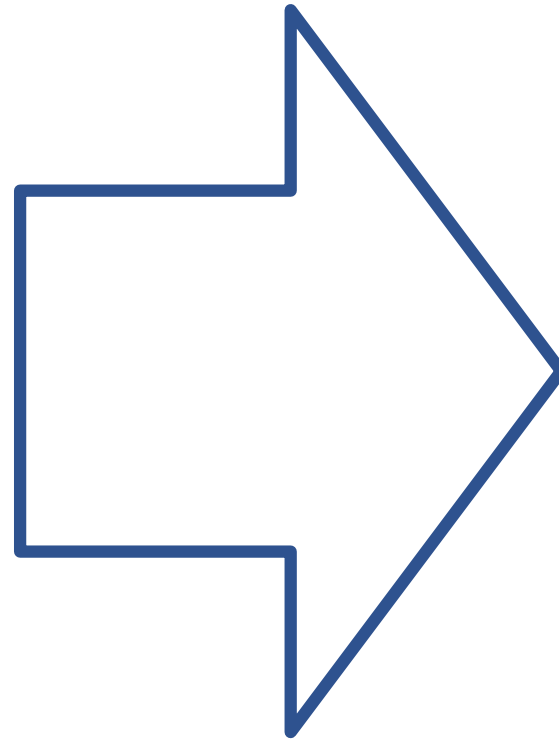
METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan (1):

(1) Jumlah anak baduta pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus (1):

$$PAB(2)Pstunting = \frac{JAB(2)P\ stunting}{JAB(2)} \times 100\%$$



Indikator 2.2.1.(a) sudah tidak lagi dicantumkan (dihilangkan) pada Metadata Edisi II karena pengukuran terkait stunting sudah terpenuhi oleh indikator 2.2.1* yang juga sudah sesuai global.

INDIKATOR 2.2.1*

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

CONTOH 3: Indikator nasional sebagai proksi yang terdapat pada Metadata Edisi I kemudian dihilangkan pada Metadata Edisi II

APA KESULITAN SELAMA INI?

**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**

The logo for the Sustainable Development Goals (SDGs) is a circular emblem composed of 17 colored segments, each representing one of the goals. The colors include shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and pink. The emblem is positioned between the words 'GO' and 'ALS' in the word 'GOALS'.

Ketersediaan data sesuai indikator pada metadata SDGs

Permasalahan SDM

Koordinasi yang belum optimal

Keterbatasan anggaran

Kurangnya pemahaman terkait SDGs dan RAD SDGs



SMART DISCUSSION SERIES 2022

AMANAH INTEGRASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S INDONESIA



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Amanah Prinsip Berkelanjutan

**UU 32/2009
Perlindungan
Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup**

KLHS → rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk **memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi** dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

**PP 46/2016 Pasal 2
ayat 2 dan Pasal 17
ayat 1 → Kemendagri
sesuai
kewenangannya
mengatur
pembuatan dan
pelaksanaan KLHS
RPJMD**

- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
- rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan **RPJM daerah**; dan
 - Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 pada **kementerian**/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota **sesuai dengan kewenangannya**.



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Amanah Prinsip Berkelanjutan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

(10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Amanah Prinsip Berkelanjutan

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- 15 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

TARGET PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, FORMAT RINGKASAN EKSEKUTIF,
TATA CARA PENELAAHAN SERTA TABEL USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori pertama” dengan tanda (*) adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; “kategori kedua” dengan keterangan huruf ((a), (b), ...) di belakang nomor adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan “kategori ketiga” tanpa tambahan keterangan adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	METODE PENGHITUNGAN
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun		
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari	1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrim.	



SMART DISCUSSION SERIES 2022

INTEGRASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S PADA DOKUMEN



SMART DISCUSSION SERIES 2022

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENAksi TPB/SDGs – EDISI II



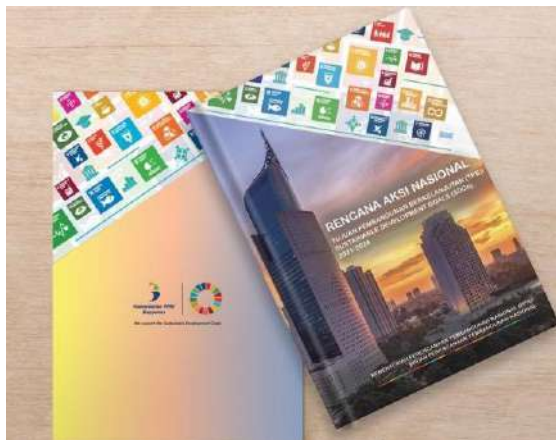
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN & EVALUASI TPB/SDGs –EDISI II



- **Renaksi TPB/SDGs: dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan** untuk pelaksanaan berbagai **program dan kegiatan** yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah baik oleh **pemerintah dan non-pemerintah** (filantropi dan bisnis, CSO dan media, akademika, dan pihak terkait lainnya).

- **Renaksi TPB/SDGs sesuai mandat Perpres No. 59/2017:**

1. **Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional.** Pemerintah Pusat menetapkan RAN TPB/SDGs. RAN 2021-2024 telah dilakukan *soft launching* oleh Menteri PPN/ Bappenas pada 23 November 2021.
2. **Renaksi TPB/SDGs di tingkat provinsi.** Gubernur menetapkan RAD TPB/SDGs yang memuat rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



RAN TPB/SDGs 2021-2024

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang Telah Direncanakan Dalam RAD SDGs

Penterjemahan ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah



- **Mengintegrasikan target & indikator** SDGs ke dalam RPJMD, RKPD, dan RENSTRA OPD
- Memastikan program dan kegiatan dalam RAD **dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan** (RKPD dan Renja PD) di tk. provinsi dan kab/kota

Koordinasi dan Kolaborasi Pelaksanaan Program



- Untuk **meningkatkan daya ungkit dan efektivitas dari program dan kegiatan** dalam RAD SDGs yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan.
- Koordinasi: **memperluas cakupan program** dan **menghindari duplikasi kegiatan**.
- Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan:
 - Antar OPD di tingkat provinsi dan antar OPD di tingkat kab/kota
 - Antara OPD provinsi dan OPD kab/kota
 - Antara OPD dengan organisasi nonpemerintah
 - Antara Pemkab/Pemkot dengan Pemdes
 - Antar organisasi nonpemerintah



Dokumen RAD
TPB/SDGs



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Sistematika Renaksi SDGs

Bab I Pendahuluan

1. Keselarasan SDGs Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
4. Pembiayaan TPB/SDGs
5. Metodologi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs
6. Sistematika Renaksi TPB/SDGs

Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs

(Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 Goals)

Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

(Arah kebijakan dan rencana capaian target (matriks 1) untuk 17 Goals)

Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS
3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Bab V Penutup

Lampiran

1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (*Matriks 2a Pemerintah Pusat/2b Pemda*)
2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah (*Matriks 3 LSM, filantropi, academia, Matriks 4 pelaku usaha*)



FORMAT MATRIKS 1

Matriks 1 (bagian dari Bab III dan Lampiran 1)

Tabel ini memuat **target SDGs, indikator SDGs, sumber data, penetapan tahun dasar** pada setiap indikator SDGs, dan **target pencapaian setiap tahun** (rencana capaian pada tataran dampak).

CONTOH MATRIKS 1

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target Pencapaian (8)				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target SDGs (2)									

Tabel 3.12
Target Pencapaian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).		Peserta Proper		14	15	16	17	18	19
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		Juta ton		205	750	1000	1350	1500	2000
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).		Juta ton		756.420	665.656	585.777	463.935	418.542	375.788

FORMAT MATRIKS 2b

Matriks 2b Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah

Tabel ini memuat **program, kegiatan, dan sub-kegiatan** beserta **target tahunan, sumber pendanaan, dan alokasi anggaran indikatif 5 tahun** dari setiap sub kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah

Program/Kegiatan/SubKegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:													
Kode dan Nama Program:													
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan										

Keterangan:

- Diisi dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, kode dan nama sub-kegiatan yang terkait pencapaian target indikator SDGs (berdasarkan lampiran Permendagri 90/2019 (diperbaharui dengan Kepmendagri 050/5889 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah)
- Diisi dengan satuan untuk mengukur sub-kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst)
- Diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target dari dokumen resmi termutakhir
- Diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap rincian *output* dalam juta rupiah (Pemerintah Daerah)
- Diisi dengan diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan selama 5 tahun (APBD, DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat)
- Diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan dari sub kegiatan tersebut
- Diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program/kegiatan/rincian output tersebut

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022

CONTOH MATRIKS 2B

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar 2015	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2017	2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya Produktivitas Keluarga Fakir Miskin Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KK)	1340 KK, 5360 Jiwa	1340 KK, 5360 Jiwa	2525 KK, 10069 Jiwa	2555 KK, 10220 Jiwa	2885 KK, 11540 Jiwa	3105, 12420 Jiwa	19.393.874.679	APBD	Dinas Spsosal
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perdesaan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perdesaan	KUBE								
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perkotaan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perkotaan	KUBE								
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau-pulau	Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin pesisir dan pulau-pulau	KUBE								
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlintar, Meningkatnya pengetahuan relawan yang terlatih di bidang kebencanaan, Meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instansi terkait serta terlaksananya pemantauan PKH	KK,JIWA,Org	7771 KK, 41156 Jiwa, 216 Org, 2 Keg, 1 Lap	8272 KK, 45271 Jiwa, 323 Org, 2 Keg, 1 Lap	9099 KK, 49789 Jiwa, 431 org, 2 keg, 1 lap	10008 KK, 54777 Jiwa, 540 Org, 2 Keg, 1 Lap	11000KK, 6254 Jiwa,650 Org, 2 keg, 1 Lap	14.742.902.975	APBD	DINAS SOSIAL

FORMAT MATRIKS 3

Matriks 3 Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Organisasi Kemasyarakatan/ CSO, Filantropi, Akademia)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs										
Nama Program 1										
Nama Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan:									
	1.2. Output Kegiatan:									
Nama Kegiatan 2:	2.1. Output Kegiatan:									
	2.2. Output Kegiatan:									

Keterangan:

1. Diisi dengan nama program, nama kegiatan, dan *output* kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs
2. Diisi dengan satuan untuk mengukur *output* kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.)
3. Diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target yang ditetapkan dalam dokumen lembaga pelaksana
4. Diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.) untuk setiap output kegiatan dalam juta rupiah
5. Diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan output kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.)
6. Diisi dengan lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa)
7. Diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut

CONTOH MATRIKS 3

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang										
PROGRAM 1. PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN DAN ANAK MUDA DI SULAWESI TENGAH										
Kegiatan 1. Pendidikan dan Pengorganisasian Perempuan Desa dan Kelurahan	1.1 Keaktifan Perempuan dalam mengikuti kegiatan Balai Belajar Kampung	Orang	300	500	800		50.000.000	TIFA/TAF	Palu, Poso, Donggala, dan Parimo	Sikola Mombine
Kegiatan 2. Kelas Belajar Balai Kampung (BBK)	2.1 Pelaksanaan Kelas Belajar Kampung (kelas dasar)	Kelas	15	25	40		200.000.000	TIFA/TAF	Palu, Poso, Donggala, dan Parimo	Sikola Mombine
	2.2 Perubahan Pengetahuan Perempuan di tingkat Desa/ Kelurahan	Orang	150	250	400		200.000.000	TIFA/TAF	Palu, Poso, Donggala, dan Parimo	Sikola Mombine
Kegiatan 3. Kelas Belajar Penggerak Muda	3.1 Anak muda yang terlibat dalam kelas Belajar Penggerak Muda	Orang	200	300	500		300.000.000	TAF	Palu, Poso	Sikola Mombine
	3.2 Anak muda yang terlibat dan memiliki inisiatif menggerakkan komunitas	Orang	-	-	-		30.000.000	TAF	PALU	Sikola Mombine
	3.3 Anak muda yang mampu mengkampanyekan isu lingkungan	Orang	75	-	-		35.000.000	TAF	PALU	Sikola Mombine

Format Matriks 4

Matriks 4 Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Pelaku Usaha/Bisnis)

NAMA PERUSAHAAN

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan Ukur (8)	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun) (9)	Target Jangka Panjang (hingga tahun XXXX) (10)	Target Tahunan (11)					Alokasi Pendanaan (Rp Juta) (12)
Kode sesuai Lampiran POJK 51/2017 (1)	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (2)	Kode Indikator SDGs (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Nomor urut (sesuai Aspek) (5)	Kegiatan /Proyek/ Program (6)	Indikator Capaian (7)				Target tahun XXXX	Target tahun XXXX	Target tahun XXXX	Target tahun XXXX	Target tahun XXXX	

Keterangan:

1. Diisi dengan kode sesuai uraian kegiatan (Lampiran 3 Pedoman Renaksi)
2. Diisi mengacu pada POJK 51/03/2017 dan SSEOJK ttg TJSL, isian uraian kegiatan (Lampiran 3 Pedoman Renaksi)
3. Diisi dengan kode nomor indikator TPB/SDGs Indonesia mengacu kepada pedoman metadata TPB/SDGs Indonesia
4. Diisi dengan nama indikator TPB/SDGs mengacu kepada pedoman metadata TPB/SDGs Indonesia
5. Diisi sesuai jumlah kegiatan/proyek/program berkelanjutan yang akan dikerjakan
6. Diisi dengan uraian nama kegiatan/proyek/program yang akan dikerjakan untuk mencapai indikator capaian di kolom 7
7. Diisi dengan indikator capaian sesuai dengan uraian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/03/2017
8. Diisi dengan satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst.)
9. Diisi dengan jangka waktu pelaksanaan setiap kegiatan/proyek/program (dalam tahun) untuk mencapai target indikator sesuai kolom 7
10. Diisi dengan target capaian indikator jangka panjang bisa tiga atau lima tahun
11. Diisi dengan target tahunan dari indikator capaian (bila ada)
12. Diisi dengan indikasi pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan (kolom 6) selama jangka waktu yang direncanakan (kolom 9) dalam juta rupiah

F	G	Q	R
NO. INDIKATOR	INDIKATOR	JENIS URUSAN	KATEGORI JENIS URUSAN
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	sosial	Wajib Pelayanan Dasar
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	sosial	Wajib Pelayanan Dasar
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	sosial	Wajib Pelayanan Dasar
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	sosial	Wajib Pelayanan Dasar
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar

Dijawab dengan apa di dokumen perencanaan?

**Program?
Kegiatan?
Sasaran OPD?**



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Terima Kasih

Visit Us :

